

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan dan kemiskinan adalah dua variabel yang saling terikat. Pembangunan merupakan proses atau usaha untuk meningkatkan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu wilayah atau negara menjadi lebih baik. Ini melibatkan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, serta pembangunan manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan sebagai proses perbaikan ke arah yang lebih baik dalam sisi ekonomi ataupun non ekonomi dengan kegiatan perekonomian yang bisa menaikkan standar hidup manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia untuk menopang kehidupan ini mencakup makanan, tempat tinggal dan pakaian.

MG Harahap dalam Sosodoro et al.(2023) mengatakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan menuju perbaikan yang dilakukan secara sengaja dan terencana. Masyarakat merupakan pemain utama dalam pembangunan ekonomi sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai pemandu dan pendukung pembangunan ekonomi. Salah satu cara untuk mengetahui apakah proses pembangunan berhasil atau tidak adalah apabila ekonomi tumbuh.

Pembangunan bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan memajukan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Individu dapat dikatakan miskin jika tingkat pendapatan atau taraf hidupnya benar-benar di bawah tingkat penghidupannya. (Khusaini et al., 2023)

Kemiskinan sering kali menyebabkan ketidaksetaraan dalam masyarakat dan dapat menjadi hambatan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia kemiskinan menjadi sangat mendesak untuk ditangani. Ini merupakan

persoalan struktural dan kultural yang multidimensi di dalamnya mencakup masalah politik, sosial, ekonomi, aset, sumberdaya alam, psikologi dan lain-lain. (Sukesi, 2015).

Kemiskinan menjadi masalah pertama yang harus dipecahkan dalam *Sustainable Development Goal's* (SDGs) Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. SDGs merupakan bentuk komitmen global dan nasional untuk mensejahterakan masrakat. Terdapat 17 tujuanyang telah dideklarasikan baik oleh negara maju maupun berkembang pada tahun 2030 di Sidang Umum PBB pada September 2015. (BAPPENAS, 2022). *World Bank* memandang kemiskinan sebagai hilangnya kesejahteraan. Sementara itu menurut TNP2K, kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk bisa memenuhi standar hidup tertentu. *World Bank* memaknai kemiskinan ekstrem sebagai kondisi hidup dibawah US\$1,90 (setara dengan Rp26.596,67 perorang perhari. (Malik, 2022)

Menurut Mankiw (2012), tingkat kemiskinan merujuk pada persentase populasi yang pendapatan keluarganya berada di bawah batas minimum atau yang disebut sebagai garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasarmakanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin diartikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. (BPS, 2024)

Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Jambi masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Kondisi ini masih menjadi masalah mendasar dalam perencanaan pembangunan dan selalu menjadi isu prioritas setiap tahun. Kemiskinan ini umumnya berkaitan dengan berbagai faktor seperti urbanisasi, ketimpangan pendapatan, akses terbatas ke layanan pendidikan dan kesehatan, hingga kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai. Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, Kota Jambi menjadi magnet bagi migrasi penduduk dari wilayah pedesaan, yang dapat memperburuk masalah kemiskinan di perkotaan.

Kota Jambi sebagai Ibukota Provinsi Jambi pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk 627.774 jiwa dengan luas wilayah 175,5 km². Kota Jambi terdiri dari 11 Kecamatan, 62 Kelurahan serta 1.650 RT. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 tingkat kemiskinan Kota Jambi terbilang tinggi.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi Pada Tahun 2020 – 2024

Kota/Kabupaten	Tingkat Kemiskinan (%)					Rerata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Tanjab Timur	10,95	11,39	10,91	10,85	10,14	10,85
Tanjab Barat	10,29	10,75	10	9,79	9,54	10,07
Batang Hari	9,65	10,05	9,63	9,45	8,63	9,48
Merangin	8,63	9,11	8,7	8,9	8,40	8,75
Sarolangun	8,42	8,87	8,48	8,54	8,36	8,53
Kota Jambi	8,27	9,02	8,33	8,24	7,73	8,32
Kerinci	7,3	7,71	7,57	7,54	6,93	7,41
Tebo	6,26	6,68	6,34	6,46	6,12	6,37
Bungo	5,8	6,23	5,38	5,29	5,06	5,55
Muaro Jambi	3,83	4,53	4,47	4,43	3,65	4,18
Kota Sungai Penuh	3,03	3,41	2,97	3,00	2,92	3,07
PROV. JAMBI	7,58	8,09	7,62	7,58	7,10	7,10

Sumber : BPS Provinsi Jambi (Diolah)

Meskipun pembangunan Kota Jambi cukup pesat, indikator perekonomian menunjukkan angka yang terus membaik namun kondisi tingkat kemiskinan tidak mengalami perubahan signifikan. Dari Tabel 1 diketahui persentase penduduk miskin di Kota Jambi selalu berada diatas Provinsi Jambi. Jika diurutkan, Persentase penduduk miskin di Kota Jambi menempati peringkat ke enam dibandingkan seluruh kabupaten/kota lainnya di dalam Provinsi Jambi. Secara berurutan enam besar persentase penduduk miskin yang paling tinggi di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun lalu Kota Jambi.

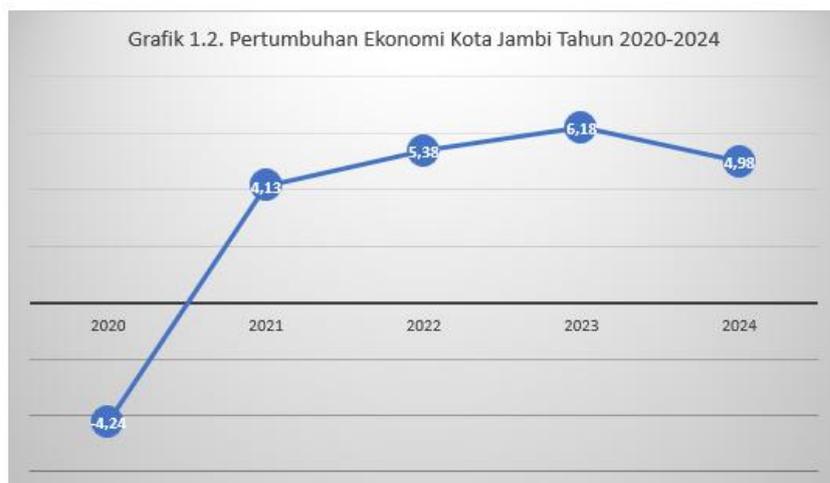


Sumber : BPS Kota Jambi, 2025 (Diolah)

Berdasarkan grafik 1.1 kondisi tingkat kemiskinan di Kota Jambi dalam dalam 5 tahun menunjukkan tren menurun dengan rerata sebesar 8,32%. Angka kemiskinan tertinggi terjadi pada 2021 sementara tingkat kemiskinan terendah terjadi pada 2024. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan, termasuk kurangnya akses ke pendidikan yang berkualitas, kesempatan kerja yang terbatas, konflik dan perang, ketidakstabilan ekonomi, serta ketidaksetaraan gender dan diskriminasi. Penanggulangan kemiskinan melibatkan berbagai strategi, termasuk program pemerintah untuk memberikan bantuan sosial, pelatihan kerja, akses ke layanan kesehatan yang terjangkau, serta kebijakan yang mendukung inklusi sosial dan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.

Kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan ekonomi dan sosialnya. Kondisi ini sering kali tercermin dalam beberapa aspek, seperti rendahnya produktivitas, lemahnya kemauan untuk maju, dan keterbatasan dalam hal modal, pendidikan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Hardana (2023), pendidikan memainkan peran yang sangat penting sebagai jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dengan pendidikan yang memadai, seseorang dapat meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan, dan membuka peluang baru yang dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Pendidikan memberikan dasar bagi individu untuk menjadi lebih produktif, mengembangkan kemauan untuk maju, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

Setiap wilayah mempunyai faktor berbeda yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Oleh karena itu, dalam mengentaskan kemiskinan harus ditemukan penyebab utama serta karakter dari kemiskinan itu tersendiri. Ragnar Nurkse pada tahun 1953 mencetuskan Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Cycle of Poverty*) yang menggambarkan kemiskinan sebagai suatu siklus yang berulang tanpa ujung pangkal yang jelas. Menurut teori ini, unsur-unsur yang menyebabkan kemiskinan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, menciptakan siklus yang sulit diputus.



Sumber : BPS Kota Jambi,2025 (Diolah)

Grafik 1.2. menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada tahun 2024 sebesar 4,01 persen. Angka ini melambat jika dibanding dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang mencapai 6,18 persen dan 2022 sebesar 5,38 persen. Namun rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tiga tahun terakhir sebenarnya sudah diatas target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2024 yakni sebesar 5%. Meski pandemi covid 19 sempat membuat pertumbuhan ekonomi Kota Jambi anjlok hingga -4,24 pada 2020, namun terjadi perbaikan yang signifikan. Terbukti dengan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi yang cenderung terus membaik.

Menurut Mankiw (2012), pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan produksi, yang pada akhirnya dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja. Dengan bertambahnya lapangan kerja ini maka dapat menggerakkan perekonomian masyarakat sehingga berkontribusi pada penurunan kemiskinan.

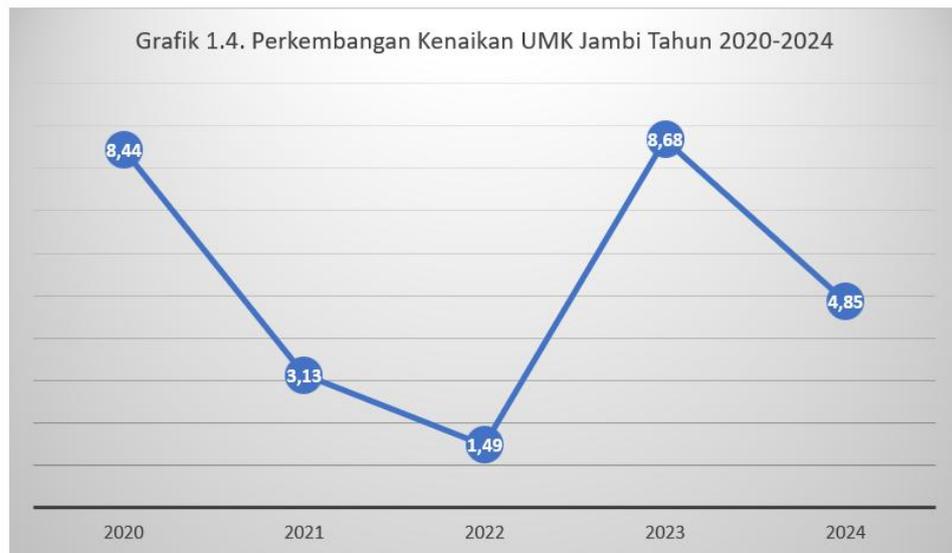
Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga memiliki kaitan dengan kemiskinan. Dimana ketika inflasi meningkat, harga barang dan jasa naik, sehingga daya beli masyarakat miskin menurun secara signifikan. Orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan paling terdampak karena pengeluaran mereka sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan perumahan. Akibatnya, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat mendorong lebih banyak orang jatuh ke dalam kemiskinan, terutama jika pendapatan mereka tidak meningkat sebanding dengan kenaikan harga.



Sumber : BPS Kota Jambi 2025 (Diolah)

Grafik 1.3. menggambarkan perkembangan laju inflasi di Kota Jambi selama 5 tahun terakhir. Pada 2020, inflasi tercatat sebesar 3.09 persen, lalu turun menjadi 1,67 pada 2021 dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 hingga mencapai sekitar 6.39 persen. Namun, inflasi kembali menurun pada tahun 2023 hingga 3.27 persen, lalu terus menurun tajam pada tahun 2024 hingga diangka 1,16 persen.

Dari pola ini, terlihat bahwa inflasi di Kota Jambi cenderung fluktuatif. Kenaikan signifikan yang terjadi pada tahun 2022 bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti gangguan rantai pasok global, kebijakan ekonomi nasional, atau dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa. Namun, setelah lonjakan tersebut, inflasi mulai mereda pada tahun 2023, menunjukkan adanya upaya stabilisasi ekonomi atau pemulihan dari dampak sebelumnya.



Sumber : DTKK Kota Jambi, 2024 (Diolah)

Perbaikan ekonomi pasca Covid-19 juga tergambar dalam Upah Minimum Kota (UMK) Jambi. Grafik 1.4. menunjukkan perkembangan persentase kenaikan UMK selama periode 2020 hingga 2024. Secara berurutan UMK Jambi pada periode tersebut sebesar Rp2.839.728; Rp2.928.612; Rp2.972.192; Rp3.230.207 dan Rp3.387.064. Sejak tahun 2020, terjadi besaran kenaikan UMK terus menunjukkan grafik menurun hingga pada tahun 2022 hanya naik 1,49 persen. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan kenaikan UMK hingga 8,68 pesen. Namun pada 2024 kenaikan UMP hanya sebesar 4,85 persen.

Upah minimum memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di suatu kota. Ketika upah minimum dinaikkan, pekerja berupah rendah mendapatkan penghasilan lebih baik, yang dapat meningkatkan daya beli mereka. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, masyarakat berpenghasilan rendah lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan. Upah minimum yang memadai dapat membantu menjaga kesejahteraan masyarakat rentan, mencegah mereka jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam saat kenaikan harga barang dan jasa.



Sumber : BPS Kota Jambi 2025 (Diolah)

Komponen lain yang berhubungan dengan kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menggambarkan kondisi pendidikan, standar hidup layak, harapan hidup hingga ketimpangan. IPM berperan pada pengentasan kemiskinan karena komponennya ada indikator pendapatan perkapita masyarakat. Pada IPM juga ada indeks kesehatan dan indeks pendidikan yang menjadi faktor non ekonomi yang dapat mempengaruhi kemiskinan suatu daerah.

Saat ini IPM menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi dan tolak ukur suatu daerah yang seharusnya berkorelasi negatif terhadap kemiskinan. Apabila suatu daerah memiliki IPM yang tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga meningkat, maka jumlah penduduk miskin akan berkurang. Grafik 1.5. menggambarkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Jambi selama 5 tahun. Indeks terendah IPM Kota Jambi terjadi pada 2020 yaitu

senilai 79,19 dan indeks tertinggi ada pada tahun 2024 yakni di angka 81,77. Tingginya IPM Kota Jambi pada 2023 tidak hanya malampaui IPM Indonesia yang sebesar 75.02 tetapi juga IPM Provinsi Jambi sebesar 74.36. Membaiknya angka IPM di Kota Jambi didukung oleh semakin baiknya nyaris seluruh komponen yang ada pada IPM seperti derajat kesehatan, indeks pendidikan serta pengeluaran per kapita.

Disisi lain, dalam pengentasan kemiskinan pertumbuhan penduduk merupakan variabel yang juga diperhatikan. Meski tidak selalu negatif, namun pertumbuhan penduduk yang dikendalikan dengan baik disertai dengan kebijakan yang tepat dapat memberi manfaat ekonomi yang besar yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adam Smith dalam teorinya menjelaskan pertumbuhan penduduk berdampak dengan peningkatan sumber daya ekonomi. Selain itu juga berdampak dengan pertumbuhan hasil produksi bila diikuti oleh kualitas dan produktivitas maka bisa berdampak baik juga untuk perekonomian. Tapi sebaliknya, bila pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka akan menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi seperti meningkatnya angka kemiskinan.



Sumber : BPS Kota Jambi 2025 (Diolah)

Grafik 1.6. menunjukkan persentase perkembangan jumlah penduduk Kota Jambi dari tahun 2020 hingga 2024. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan penduduk di Kota Jambi relatif stabil dengan rata-rata 0,99 persen. Namun, pada tahun 2021, jumlah penduduk mengalami penurunan hingga 0,13 persen yang dapat mencerminkan kemungkinan adanya penurunan angka kelahiran, migrasi,

atau dampak sosial-ekonomi lainnya yang terjadi pada periode tersebut. Setelah penurunan tajam di tahun 2021 itu, jumlah penduduk pada tahun 2022 naik kembali hingga 1,21%, lalu naik 1,33% hingga pada tahun 2024 menjadi 1,17% pertahun.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan juga telah dibahas oleh Rahma dkk (2019) dengan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian berikutnya oleh Agustin,N dkk (2019) menyimpulkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, IPM dan UMP berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Merangin.

Sementara itu pada penelitian Juniati (2023) menyimpulkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, sementara variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adanya anomali yang terjadi di Kota Jambi, yang tergambar dari pesatnya kemajuan kota dengan terus membaiknya indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang bagus, inflasi dan jumlah penduduk yang terkendali serta Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat dan upah minimum yang selalu naik setiap tahunnya namun tidak diikuti penurunan kemiskinan yang signifikan maka diperlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk menganalisis determinan kemiskinan di Kota Jambi.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Dinamika Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, IPM dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Kota Jambi??
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, IPM dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Kota Jambi dalam jangka panjang dan jangka pendek?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dinamika Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, IPM dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Kota Jambi.
2. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, IPM dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Kota Jambi dalam jangka panjang dan jangka pendek.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Dunia pendidikan atau akademisi yaitu bisa memperkaya khasanah kepustakaan dan juga dapat menjadi pelengkap penelitian yang sudah ada sebelumnya.
2. Praktisi yaitu bisa dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan strategi pengentasan kemiskinan oleh Bappeda dan instansi terkait lainnya di Kota Jambi.